

ASEAN Dalam Neo Kolonialisme dan Imperialisme

Donatus Kladius Marut, dkk¹

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara

Abstract: *Neocolonialism is the geopolitical practice of using capitalism, business globalization, and cultural imperialism to influence a country, in lieu of either direct military control (imperialism) or indirect political control (hegemony). In post-colonial studies, the term neo-colonialism describes the influence of countries from the developed world in the respective internal affairs of the countries of the developing world; that, despite the wars of Spanish American wars of independence at the beginning of the nineteenth century, and decolonisation that occurred in the aftermath of the Second World War (1939–45), the (former) colonial powers continue to apply existing and past international economic arrangements with their former colony countries, and so maintain colonial control.*

Kata Kunci: *Neo Kolonialisme; Imperialisme; ASEAN*

Pendahuluan

Keberadaan organisasi ASEAN saat ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarahnya. Jauh sebelum organisasi ASEAN ini didirikan, bangsa-bangsa di Asia Tenggara telah mengalami penindasan kolonialisme dan imperialisme yang panjang. Selama berabad-abad lamanya negara-negara di kawasan ASEAN mengalami penindasan dan penghisapan yang dalam oleh negara-negara Eropa dan Amerika.

Kawasan ini telah menjadi lahan perebutan sumber daya alam negara-negara Eropa sejak abad ke-16. Portugis adalah kekuatan Eropa pertama menjajah Asia Tenggara, dengan cara menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Belanda mengambil-alih Malaka dari Portugis di tahun 1641, sedangkan Spanyol mulai mengkolonisasi Filipina sejak tahun 1560-AN. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur yang bertindak atas nama Belanda, mendirikan kota Batavia (sekarang Jakarta) sebagai pusat perdagangan dan ekspansi ke daerah-daerah lainnya di pulau Jawa, serta wilayah sekitarnya.

Inggris, yang diwakili oleh British East India Company menduduki Penang Malaysia. Di tahun 1819, Stamford Raffles mendirikan Singapura sebagai pusat perdagangan Inggris. Sejak tahun 1850-an dan seterusnya, mulailah terjadi peningkatan kecepatan kolonisasi di Asia Tenggara. Tahun 1913, Inggris telah berhasil menduduki Burma, Malaya dan wilayah-wilayah Borneo, Perancis menguasai Indocina, Belanda memerintah Hindia Belanda, Amerika Serikat mengambil Filipina dari Spanyol, sementara Portugis masih berhasil memiliki Timor Timur. Jepang negara terakhir menduduki Asia Tenggara melalui agresi militer hingga akhir perang dunia II. Meski singkat agresi militer Jepang menimbulkan korban yang besar, berlangsung sangat kejam dan mewariskan trauma sejarah hingga saat ini.

Penguasaan kolonial memberikan dampak yang nyata terhadap Asia Tenggara. Kekuatan-kekuatan kolonial memang memperoleh keuntungan yang besar dari sumber daya alam dan pasar Asia Tenggara yang besar. Namun pada saat yang sama penindasan

¹ Donatus Kladius Marut adalah Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara. Turut terlibat dalam penulisan artikel ini antara lain Henry Saragih, Dani Setiawan, dan para aktivis LSM dari Infid, IGJ, Migran Centre, Walhi, Serikat Petani Indonesia, Kiara, dan lainnya.

kolonialisme turut menaburkan benih-benih kebangkitan gerakan nasionalisme dan perlawanan. Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris TAHUN 1957, Singapura tahun 1965 dilepaskan dari Malaysia, Brunei diberikan kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1984 dan Philipina meraih kemerdekaan secara defacto tahun 1946. Vietnam dideklarasikan sebagai negara merdeka 1945, namun terlibat dalam pertempuran paling hebat dalam sejarah melawan imperialisme AS hingga 1975 hingga meraih kemenangan mutlak. Hanya Thailand satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara-negara Eropa dan AS.

Pasca perang dunia II, pertarungan untuk merebut Asia Tenggara terus berlangsung. Kemerdekaan negara-negara di Asia Tenggara tidak mengahiri dominasi negara-negara imperialis di kawasan ini. Perusahaan-perusahaan asing, asal AS, Uni Eropa, Jepang, masih menguasai sebagian besar sumber perkebunan, tambang dan migas.

Pertarungan merebut sumber daya alam dan pasar menyebabkan Asia Tenggara masuk dalam polarisasi ideologi yang ekstrim. Pertarungan antara blok sosialis dengan kapitalis melahirkan perang melawan imperialisme dan konflik nasional yang berdarah. Lebih dari satu juta warga sipil, 200.000 hingga 300.000 orang Viet Minh dan lebih dari 95.000 anggota pasukan kolonial Perancis telah kehilangan nyawanya. AS mengerahkan sekitar setengah juta tentaranya ke Vietnam, membombardir Vietnam utara dengan bom-bom yang mematikan melampaui jumlah yang digunakan semasa perang dunia kedua. Jumlah korban jiwa selama 30 tahun perang Vietnam mencapai 400 ribu. Di Indonesia pertarungan ideologi telah menyebabkan sekitar 1-2 juta orang-orang komunis dan nasionalis tewas dalam peristiwa kontra revolusioner tahun 1965.

ASEAN lahir tahun 1967 atas inisiatif Indonesia pasca penghancuran total kekuatan kerakyatan di negara ini. ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa awal, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Pada tingkat tertentu ASEAN memang merupakan bagian dari strategi untuk membendung kekuatan ideologi kiri masuk kembali ke kawasan ini.

Namun demikian semangat anti imperialisme tidak pupus dan masih melekat kuat dikalangan rakyat di Asia Tenggara. Masuknya TNC/MNC, negara maju dan lembaga keuangan multilateral dalam mengontrol kawasan Asia Tenggara semakin menguatkan sentimen anti penjajahan Asing. Sentimen itu dipicu oleh semakin kuatnya penguasaan modal asing terhadap tanah, sumber energi, keuangan dan hilangnya akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyebabkan semakin memburuknya kondisi ekonomi rakyat.

Menyadari hal tersebut negara utara mengubah strategi penjajahannya dengan bentuk baru yang terkesan modern yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi tidak lain adalah globalisasi pasar, atau juga disebut pasar bebas. Melalui pasar bebas globalisasi ekonomi maka negara-negara maju dapat dipastikan akan tampil sebagai pemenang. Dengan demikian mereka dapat melanjutkan praktek perampasan kekayaan negara-negara miskin.

Fakta bahwa negara-negara anggota ASEAN masih terjajah menyuburkan semangat untuk membebaskan diri dari segala bentuk imperialisme dan neokolonialisme masih melekat kuat dalam jiwa dan semangat pada gerakan sosial kawasan ini. Dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, meletakkan cita-cita pembebasan nasional yang prioritas utama dan jalan terbaik untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Regionalisme ASEAN Adalah Alat Penjajahan Baru

Meskipun bangsa-bangsa di Asia Tenggara telah memperoleh kemerdekaan formal, akan tetapi secara ekonomi dan politik belum dapat meraih kemerdekaan sepenuhnya. Hingga saat ini kekayaan alam negara-negara Asia Tenggara masih dibawah kontrol negara-negara utara yang dikerjakan dalam model investasi kolonial. Perusahaan dari EU, AS, Jepang menguasai sebagian besar kekayaan migas, tambang, perkebunan, perbankan dan keuangan di kawasan ini. Arah kebijakan dan anggaran publik dikontrol melalui instrumen utang luar negeri yang melahirkan ketergantungan sepanjang masa.

Setelah sukses mengarahkan masing-masing negara anggota ASEAN dalam sistem kapitalisme pasar bebas, kini negara-negara maju dan lembaga keuangan global hendak menyatukan kawasan ini dalam satu sistem ekonomi yang sama. Konsep ini ditujukan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi tunggal dengan menerapkan aturan bersama yang mengikat melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA). Gagasan membentuk pasar tunggal ini telah dimulasi sejak 1992 dan semakin intensif dikerjakan sejak krisis moneter 1998. Motivasi ekonomi yang besar semakin terlihat dalam berbagai perundingan pimpinan ASEAN sejak krisis keuangan global 1998.

Meskipun organisasi ASEAN dibangun diatas tiga pilar, yaitu politik keamanan, ekonomi, dan sosial cultural, tampaknya pilar economic community menjadi prioritas yang ingin segera dicapai. Pilar kerjasama ini tidak lain adalah strategi pembentukan pasar tunggal, yang terkoneksi secara kuat dengan kapitalisme global. Strategi tersebut terlihat dari definisi ASEAN Economic Community (AEC) yaitu; (a) a single market and production base, (b) a highly competitive economic region, (c) a region of equitable economic development, and (d) a region fully integrated into the global economy. Konsep kerjasama semacam ini rapuh dan sangat membahayakan karena tidak memiliki pijakan sejarah dan menjadi pintu masuk bagi ekspansi modal asing.

Arah kebijakan ekonomi ASEAN dicurigai sebagai agenda negara-negara maju untuk menjadikan ASEAN sebagai lahan untuk mengeruk sumber daya alam dan ekspansi pasar produk industri dan jasa keuangan. Negara-negara maju hendak mempertahankan dan meningkatkan dominasi ekonomi dan politiknya di ASEAN. Kawasan ASEAN memang merupakan lokasi favorit untuk perusahaan-perusahaan multinasional (TNC & MNC) Uni Eropa, AS dan Jepang.

Dalam tahun 2000-2008 Uni Eropa mengalirkan dana investasi sebesar US\$ 93,6 miliar, jumlah yang terbesar. Jepang pada urutan kedua dengan investasi sebesar US\$ 48,2 miliar dan AS dengan investasi sebesar US\$ 34,9 miliar berada pada urutan ketiga dalam periode ini (ASEAN Statistical Yearbook, 2008). Namun total investasi langsung AS yang tercatat sampai tahun 2006 di wilayah ini adalah US\$ 99 miliar, nilai tersebut setara empat kali lipat di China dan sepuluh kali lipat yang di India (Michael Plummer, 2011, <http://www.eastwestcenter.org>).

ASEAN adalah pasar yang menjanjikan, memiliki populasi hampir 600 juta jiwa, dengan sumber daya alam tambang, migas, batubara, sumber perikanan dan hasil hutan yang melimpah. Sebagian anggota ASEAN merupakan negara yang sedang membangun, haus investasi asing dan utang luar negeri dalam rangka mengembangkan infrastrukturnya. Potensi dan masalah yang dihadapi anggota ASEAN dipandang oleh negara maju sebagai pasar bagi ekspansi perdagangan, investasi dan utang luar negeri.

Krisis finansial yang saat ini melanda negara-negara maju, mendorong mereka secara lebih agresif untuk menguasai pasar ASEAN, mengontrol sumber daya alam, pasar keuangan, jasa-jasa dan asuransi. Ini merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi

kejenruhan pasar, di AS, EU dan Jepang dalam skema caunter cyclical policy. Dengan demikian mereka dapat memindahkan beban krisis keuangan dan membentuk apa yang disebut “keseimbangan global baru”. Keseimbangan yang hanya dapat diraih dengan menghisap lebih dalam negeri-negeri miskin.

Utang Luar Negeri yang Menjerat Negara ASEAN

Strategi yang digunakan negara maju adalah mendorong ASEAN menjadi suatu kawasan yang terintegrasi, baik diantara negara anggota ASEAN sendiri maupun dengan pasar global. Untuk itu negara maju mengerahkan dukungan melalui utang langsung dan melalui lembaga keuangan multilateral bagi pembangunan infrastruktur dalam rangka mengintegrasikan ekonomi ASEAN.

Ini sejalan dengan sikap menghiba, memohon utang dari lembaga keuangan internasional dan negara-negara maju melalui apa yang disebut dengan Chiang-Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), Asian Bond Markets Initiative (ABMI), Fasilitas Jaminan Kredit Investasi (CGIF). Utang-utang tersebut akan digunakan kembali untuk membangun infrastruktur untuk konektivitas ASEAN dalam rangka mempermudah pengerukan sumber daya alam dan ekspansi pasar sejalan dengan ASEAN Economic Community (AEC), yang akan membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi pada tahun 2015. Kesemuanya jelas untuk mendukung kepentingan bisnis modal besar dari negara maju sebagai pihak yang memberi utang.

World Bank (WB) memperkirakan developing East Asian countries membutuhkan dana sekitar US\$ 1.2 Triliun sampai US\$ 1.5 Triliun untuk investasi di sektor infrastruktur sampai tahun 2010 (PKKSI, DepKEU, 2009). Angka yang sangat besar yang melebihi pembiayaan infrastuktur pasca perang, yang dapat menghidupkan kembali industri minyak, besi baja, di negara-negara maju, AS, Jepang, dan EU yang saat ini tengah diterjang krisis (World Bank, 2009).

Dalam proyek infrastruktur yang ambisius ini, Asian Development Bank (ADB) mengajukan program pembentukan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) yang akan menjadi Special Purpose Vehicle (SPV) di bawah koordinasi ADB. Modal awal untuk SPV ini direncanakan didapat dari kontribusi negara-negara ASEAN-5 sebesar masing-masing US\$150 juta. Modal awal ini kemudian akan di-leverage dengan cara mengeluarkan surat utang AIF dengan peringkat AA yang diharapkan akan dibeli oleh bank-bank sentral di ASEAN.

Jepang menyediakan 20 miliar dolar AS untuk negara-negara berkembang di Asia, termasuk ASEAN untuk proyek infrastruktur (Koran Antara, Sabtu, 24 Oktober 2009). Selanjutnya China menjanjikan US\$ 10 miliar untuk dana pembangunan Asia Tenggara baru terealisasi US\$ 1 miliar sampai saat ini, kata diplomat pada hari Rabu di dalam pertemuan regional di Thailand. Pada bulan April, Perdana Menteri China Wen Jiabao mengumumkan rencana China untuk membentuk dana US\$ 10 miliar Dana China-ASEAN untuk kerjasama investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan ini. (Reuters, BEIJING | Wed Oct 21, 2009).

Di sektor keuangan, ADB menyetujui lebih dari US\$ 16 miliar bantuan pada tahun 2009, termasuk US\$ 2.5 miliar untuk Countercyclical Support Facility dan US\$ 850 juta untuk Trade Finance Facilitation Program untuk membentuk pasar keuangan ASEAN (Haruhiko Kuroda, ADB, 8 April, 2010). Dewan Direktur ADB menyetujui diadakannya Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) sebagai dana perwalian (trust fund) dengan kontribusi modal USD 130 juta. Pemerintah ASEAN+3 akan menyediakan secara bersama USD

570 juta untuk mengadakan fasilitas senilai USD 700 juta tersebut. CGIF pertama, mulai beroperasi di 2011, akan menyediakan jaminan bagi bond (obligasi) mata uang lokal yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah regional. Pasar obligasi mata uang lokal di Asia Timur telah meluas secara dramatis dalam tahun-tahun terakhir, dan mencapai USD 4.4 triliun pada akhir 2009. Sebuah studi yang dibiayai ADB tentang permintaan jaminan kredit menunjukkan permintaan yang signifikan, mencapai USD 25 milyar pada 2020 (Asian Development Bank, 8 April 2010).

Uni Eropa melanjutkan dukungan pembentukan dan pelaksanaan ASEAN

Project for Regional Integration Support (APRIS), yang menyediakan sarana untuk dialog kebijakan dan untuk melaksanakan studi bersama tentang integrasi ekonomi. Selama tahun lalu, dua proyek energi diluncurkan. Program EC-ASEAN Energy Facility senilai 18 juta Euro diawali Maret 2002, serta proyek Technology Transfer for Energy Cogeneration from Biomass in ASEAN Countries (COGEN Phase III) yang dimulai Februari 2002. Dalam kerjasama pembangunan, saat ini ada lima proyek senilai 55.5 juta Euro di sektor lingkungan, energi, hak kekayaan intelektual, dan pendidikan. Dua program lainnya senilai 13 juta Euro akan dilaksanakan segera. Program tersebut adalah European Commission- ASEAN Regional Co-operation Program on Standards, Quality and Conformity Assessment dan ASEAN-EC Project on Regional Integration Support (APRIS). Komisi Eropa juga mendanai pengembangan rencana bisnis ASEAN-EC Management Center di Brunei Darussalam. APRIS, sebuah proyek senilai Euro 4.5 juta, adalah sebuah kerangka program untuk membangun integrasi regional ASEAN. Program mencontoh pelajaran dari pengalaman Komisi Eropa dalam membentuk integrasi ekonomi, berkontribusi untuk memperbaiki mekanisme ASEAN dan sistem komunikasi, serta mendukung kegiatan pengembangan kapasitas bagi ASEAN Sekretariat dan Negara-negara anggota ASEAN. Kesepakatan pembiayaan APRIS ditandatangani awal 2003.

Keseluruhan utang dalam rangka integrasi ASEAN dimaksudkan untuk mengarahkan ASEAN sesuai dengan kepentingan negara-negara pemberi maju. Kebijakan ini satu sisi menguntungkan pihak pemberi utang, namun pada sisi lain akan semakin menjerat negara-negara di kawasan ini dalam beban utang yang semakin besar.

Indonesia mengalami tekanan ekonomi yang besar akibat utang luar negeri menjadi pengalim berharga. Beban bunga utang dan cicilan pokok utang luar negeri pemerintah dan swasta mencapai US\$ 41.380 juta pertahun. Ditambah dengan cicilan pokok utang dalam negeri pemerintah Rp 39.210 miliar (2008) dan bunga utang dalam negeri pemerintah sebesar Rp 70.857 miliar. Jumlah keseluruhan pembayaran hutang dan cicilan hutang pokok pemerintah dan swasta sebesar Rp. 482.487 miliar. Bandingkan dengan kenaikan PDB berdasarkan harga konstan dalam tahun 2008-2009 (atas harga konstan) yang nilainya hanya sebesar Rp 94.872 miliar. Peningkatan PDB yang merupakan hasil dari seluruh aktifitas ekonomi bahkan tidak cukup untuk membayar bunga hutang dan cicilan pokok. Akibatnya negara ini tidak dapat mengalokasikan anggaran belanjanya untuk kesejahteraan publik (Bank Indonesia, 2010).

Perjanjian Ekonomi yang Mengikat

Untuk menyukkseskan seluruh rencana liberalisasi pasar ASEAN tersebut, pemerintahan negara maju dan lembaga keuangan multilateral menyalurkan dukungan dana ke ASEAN dan negara-negara anggotanya dengan tujuan membangun regionalisme ekonomi. Dengan demikian

negara-negara maju dapat menjalankan agenda melimpahkan beban krisis dalam kawasan ASEAN dengan landasan hukum yang mengikat semua anggota ASEAN.

Melalui Programme for Regional Integration Support (APRIS II) Uni Eropa memberikan € 8.4 juta selama 3 tahun (2006 – 2009) untuk mendukung integrasi ASEAN (<http://www.aseansEC.ORG/APRIS2/INDEX.HTM>). Pada tahun 2007 AS melalui USAID memberikan US\$ 7 juta untuk technical assistance, single windows program dan integrasi pasar regional (East West Center, 2008). Jepang berkontribusi sekitar US\$ 90 juta pada tahun 2009 kepada ASEAN melalui Jepang Integration Fund untuk membangun skema kerja sama dengan kawasan ASEAN (ASEAN Secretariat, 29 June 2009).

Amerika Serikat (AS), di dalam kerangka asistensi bilateral, AS menyediakan US\$ 526 di tahun 2009 untuk sembilan negara ASEAN, terkecuali untuk Brunei Darussalam tidak menerima bantuan AS (Congressional Research Service, November 16, 2009). Selain itu Pemerintah Australia mempersiapkan dana sekitar US\$ 20 juta untuk AECWP yang pencairannya dilakukan secara tahunan selama lima tahun. AECWP akan terdiri dari dua komponen yaitu (i) pembentukan, operasionalisasi, dan penyediaan dukungan dana bagi AANZFTA Support Unit di Sekretariat ASEAN, dan (ii) penyediaan dana untuk program kerjasama ekonomi tahunan yang telah mendapatkan persetujuan FTA Joint Committee. Sebagai dukungan atas ditandatanganinya perdagangan bebas ASEAN Australia Newzealand FTA, Australia menyediakan Program Kerja sama Pembangunan ASEAN- Australia Tahap I (2002-2008) dengan dana sebesar US\$ 45 juta yang bertujuan untuk membantu integrasi ekonomi ASEAN. Program AADCP I ini telah berakhir pada bulan Juni 2008 dan Australia kemudian dilanjutkan dengan AADCP II (2008-2015) dengan dana US\$ 57 juta. (Asean Selayang Pandang, Edisi 19 Tahun 2010).

Australia memberikan bantuan sebesar US\$ 50 juta, (2002-2008) untuk mengembangkan integrasi ekonomi antar negara-negara ASEAN melalui berbagai mekanisme seperti proyek jangka menengah mempromosikan integrasi ekonomi ASEAN, memperkuat daya saing melalui kegiatan kolaboratif antara ASEAN dan lembaga-lembaga Australia (Lihat:

http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/a4t_at_a_glance_c_hapters07_e.pdf) Rencana negara-negara maju tersebut menuai keberhasilan dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN 20 November 2008. Piagam ASEAN merupakan perjanjian yang legally binding yang mengikat seluruh anggota ASEAN.

Piagam ASEAN merupakan kerangka pelaksanaan agenda liberalisasi investasi, perdagangan, keuangan dan jasa. Dalam piagam ASEAN disebutkan bahwa tujuan pembentukan ASEAN adalah “Untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi tunggal/ yang stabil, makmur, kompetitif dan terintegrasi secara ekonomi dengan fasilitas bagi perdagangan dan investasi di mana ada aliran bebas barang, jasa dan investasi; perpindahan pelaku bisnis, professional, pekerja berbakat dan buruh; dan aliran modal yang lebih bebas” (Pasal 1 ayat 5). Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf (n) ”berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar”. Kedua Pasal dalam piagam ASEAN ini merupakan konsepsi penyatuan pasar di atas landasan neoliberalisme dengan cakupan yang sangat luas meliputi seluruh isu ekonomi, investasi, perdagangan, keuangan dan perburuhan.

Kompetisi yang Saling Mematikan

Piagam ASEAN tidak hanya merupakan landasan hukum pemberlakuan Asean Free Trade Area (AFTA), akan tetapi memberi dasar hukum yang lebih kuat terhadap Free Trade Agreement (FTA) yang dilakukan melalui ASEAN dengan negara dan kawasan lainnya di dunia. FTA merupakan kesepakatan perdagangan yang komprehensif yang tidak hanya menyangkut perdagangan barang akan tetapi investasi, jasa, dan IPR/HaKI (WTO Plus).

Hingga saat ini ASEAN telah menyepakati FTA dengan China, India, Korea, Australia & Newzealand, Jepang (EPA) dan Eropa (PCA) dan secara potensial dengan Amerika Serikat dan negara lainnya. Negara-negara anggota ASEAN sebagian mengambil inisiatif sendiri menyelenggarakan FTA secara bilateral dengan negara lainnya diluar kerangka kerjasama ASEAN. Negara ASEAN terlibat dalam kompetisi kedalam sesama anggota ASEAN, dan kompetisi keluar merebut partner dagang.

ASEAN dan Amerika Serikat telah memulai kerja sama kemitraannya sejak tahun 1977. Melalui Joint Vision Statement on ASEAN-US Enhanced Partnership dengan Plan of Action 5 tahunannya (2006-2011) pada bulan Desember 2006, untuk pertama kalinya kerja sama ASEAN-US memiliki payung kerja sama dan rencana aksi yang bersifat komprehensif sebagai komitmen kerja sama ke depan. Sejak tahun 2009, telah dikelompokkan kembali prioritas kerja sama ASEAN-US Enhanced Partnership dalam 8 bidang sesuai ketiga pilar dalam masyarakat ASEAN, yaitu: Political and Security: 1) Transnational Crime, including Counter Terrorism, 2) Capacity Building for Good Governance, the Rule of Law and Judiciary Systems and Human Rights Promotion; Economic: 3) Economic Programs, 4) Finance Cooperation; Socio-Cultural: 5) Science and Technology, 6) Disaster Management, 7) Environment, Climate Change, Food and Energy Security, 8) Education, including Scholarship and Training Programs (Kemenlu, Selasa, 01 September 2009).

Hubungan diantara negara anggota ASEAN semacam ini bukanlah hal yang sehat dalam ukuran budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakatnya. Hubungan ini menjebak dalam rasa saling curiga dan saling menghisap secara ekonomi. Singapura sebagai contoh merupakan negara dengan populasi yang sangat kecil tetapi menghasilkan PDB yang besar. Singapura hidup dari industri, manufaktur dan jasa-jasa dengan menghisap sumber daya alam dari negara-negara tetangganya. Singapura menguasai 70 persen Investasi di kawasan ekonomi khusus (free trade zone) Batam salah satu wilayah kabupaten di Indonesia. Daerah ini memproduksi barang dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja murah dan kemudahan fiskal yang besar untuk menghasilkan produk made in Singapura. Selain itu negara ini berhasil menjadi eksportir migas yang besar dengan mengambil bahan mentah dari Indonesia. Kedudukan Singapura dalam ekonomi ASEAN tidak berbeda dengan posisi negara-negara industri maju terhadap kawasan ini.

FTA antara ASEAN dengan negara-negara yang memiliki ekonomi yang kuat seperti AS, EU, Jepang, China, akan melahirkan hubungan yang tidak seimbang. Negara-negara kuat baik secara finansial, teknologi dan sumber daya manusia, akan memenangkan persaingan, menghisap surplus ekonomi dari negara-negara yang miskin.

Sejak pemberlakuan FTA dengan China 2005, negara-negara miskin di ASEAN menerima tekanan impor yang sangat hebat. Di Indonesia hingga tahun 2008 mengalami defisit perdagangan dua kali lipat terhadap China. Sektor-sektor industri/ UKM bangkrut karena tidak sanggup bersaing dengan produk-produk China yang sangat murah. Ratusan perusahaan tekstil gulung tikar, demikian pula halnya dengan perusahaan baja. Puluhan perusahaan paku, kawat bangkrut sesaat setelah penurunan tarif impor diberlakukan.

Akibatnya sekitar tiga ribu pekerja kehilangan pekerjaan segera setelah FTA ASEAN China diberlakukan. Diperkirakan sekitar 500 ribu pekerja dari berbagai sektor di PHK sejak kesepakatan tersebut pada 2005 lalu.

Meskipun ASEAN mengalami surplus perdagangan dengan AS, EU dan Jepang namun data ini tidak boleh mengecohkan kita. surplus perdagangan tersebut merupakan perdagangan diantara perusahaan multinasional sendiri yang berasal dari negara-negara maju tersebut. Total investasi US di Singapura mencapai US\$ 86,05 billion dengan 1300 perusahaan. Jumlah ini hampir setara dengan seluruh investasi asing di Indonesia.

Sebagian besar ekspor dari mayoritas negara ASEAN merupakan ekspor bahan mentah yang dikerjakan oleh perusahaan multinasional dari negara maju seperti Inggris, Jepang dan AS memang dikerahkan untuk mengeruk sumber daya alam untuk dikirimkan ke pusat-pusat industri. Selanjutnya negara-negara maju mengeksport kembali ke ASEAN produk industri yang bernilai tambah tinggi. Ekspor yang besar dari ASEAN dan surplus perdagangannya hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas karena tidak memiliki hubungan langsung dengan perekonomian mayoritas masyarakat ASEAN.

ASEAN sebagai Ruang Manipulasi Isu Krisis

Krisis keuangan melahirkan unbalance ekonomi dimana produk pasar keuangan 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan produk sektor riil. Jadi krsisis ini terjadi pada dua tingkatan pertama produksi barang dan jasa yang berlebih, kedua, produk pasar keuangan yang mengalami bubble.

Kedua level krisis ini dapat diatasi dengan dua cara; pertama, Ekspansi pasar barang-barang yang berlebih dan kapital yang bertumpuk di negara maju. Kedua ekspansi finansial dan produk pasar keuangan dengan menciptakan ruang sirkulasi finansial yang baru. Cara pertama dilakukan dengan membuka investasi di negara-negara yang kaya sumber daya alam dan melakukan ekspansi perdagangan di negara yang memiliki pasar yang besar. Pasar besar tersebut sangat bergantung pada jumlah populasi dan pendapatan penduduknya. Sedangkan cara kedua dilakukan dengan menciptakan pasar finansial dan asuransi yang baru khususnya di negara-negara yang dapat menyediakan captive market yang besar. Sebagai contoh adanya dorongan untuk membuat sistem asuransi sosial atas nama perlindungan sosial di Indonesia yang dikerjakan oleh ADB dan World Bank.

Ketertarikan bank dunia terhadap kapitalisasi skema social protection mengemuka dalam kajiannya atas kemitraan ASEAN-Bank Dunia saat ini, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik, James W. Adams mengatakan bahwa, "Bank Dunia berkomitmen untuk meningkatkan agenda ekonomi dan perlindungan sosial ASEAN". Dia juga menyatakan harapannya untuk mempertahankan interaksi tingkat tinggi secara teratur. "Setelah terjadi krisis global, ada kebutuhan untuk bekerja lebih pada isu perlindungan sosial (World Bank, Januari, 2010, <http://web.worldbank.org>).

Untuk Indonesia 2009; empat tahun belakangan ini, Kelompok Bank Dunia akan menyediakan sekitar US\$ 2 miliar setiap tahun untuk membangun kapasitas institusi nasional dan lokal, terutama yang terkait dengan mitigasi bencana dan lingkungan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, pembangunan komunitas, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pembangynan sektor swast. Dukungan untuk jaringan sosial dan bebagai rogram perlindungan sosial lainnya totalnya US\$ 4,5 miliar untuk negara lebih miskin. (World Bank, Washington DC, September 11, 2008, <http://web.worldbank.org>).

Namun masalah perlindungan sosial yang dibiayai utang dari World Bank dikerjakan

dalam program karikatif seperti Jamkesmas (non-contributory health insurance for the poor), PKH (conditional cash transfer), and BLT (unconditional emergency cash assistance). Analisis akan mengambil data- data dari Indonesia untuk menyimpulkan efek dari partisipasi di dalam program ini, seperti pada program kesehatan Program Keluarga Harapan (PKH), dan profil konsumsi (BLT). (World Bank, 2010, <http://web.worldbank.org>). Dalam prakteknya pelaksanaan program ini digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu presiden oleh incumbent dalam pemilu 2009. Program justru menambah tingkat kemiskinan di Indonesia.

Asian Development Bank melaporkan pada tahun 2002 bahwa mereka telah memberikan dukungan dana melalui Financial Governance and Sosial Security Reform Program (FGSSR), dalam menyukseskan program pengamanan sosial yang salah satunya adalah asuransi sosial. Technical assistance tersebut akan disediakan, atas permintaan Pemerintah, untuk bantuan US\$ 1 juta dari Technical Assistance Funding Program dari ADB untuk membantu implementasi FGSSR, termasuk studi kelayakan untuk reformasi pengamanan sosial, pilihan restrukturisasi yang termasuk di dalamnya adalah skema asuransi sosial publik, dan bantuan dalam pembangunan hukum baru untuk jaminan sosial nasional (Asian Development Bank, 2002, Rrp: Ino 33399). Program asuransi sosial hanyalah penyediaan captive market bagi pasar asuransi yang melibatkan lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Dalam program ini masyarakat miskin, buruh miskin, juga memiliki kewajiban membayar premi dan akan semakin memperparah kondisi kemiskinan mereka.

Pelaksanaan program climate change menciptakan ancaman yang lebih besar terhadap kerusakan lingkungan. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dibiayai dengan utang luar negeri yang semakin membebani negara miskin di ASEAN. Deforestasi dilakukan dalam skema utang karbon dan perdagangan karbon, keduanya juga membahayakan karena tidak akan mengatasi masalah apapun dalam kasus ini.

World Bank di tahun 2010 menyetujui pinjaman kebijakan pembangunan yang diperuntukkan bagi penanganan perubahan iklim dan adaptasi di Indonesia. USD 200 juta "Climate Change Development Policy Loan" didesain untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam usahanya mengadopsi pertumbuhan yang rendah karbon dan tahan-iklim (climate- resilient). Dengan investasi ini, World Bank bergabung dalam dukungan yang disediakan dalam dua tahun terakhir oleh pemerintah Jepang (JICA) dan Perancis (AFD) (World Bank, Press Release NO:2010/423/EAP).

Strategi pembiayaan food crisis dalam skema utang luar negeri jelas sebuah kebodohan. Direktur bank dunia Robert B. Zoellick, Washington, DC Thursday, October 9, 2008 mengatakan ; "Di bulan Mei 2008, World Bank Group menetapkan fasilitas pembiayaan senilai USD 1.2 milyar untuk dukungan bagi golongan yang paling rentan dan terkena dampak paling parah dari krisis pangan. Kami kini telah memprogram USD 850 juta untuk ini, maka saya sangat senang bahwa Australia mengumumkan komitmen untuk (berkontribusi) 50 juta Dollar Australia bagi dana tersebut, tetapi kami akan memerlukan lebih dari itu. Saya juga mendesak donor-donor Eropa untuk mendukung usulan Presiden Komisi Eropa, Barroso, senilai 1 milyar Euro untuk mendukung warga miskin yang memerlukan dan petani-petani kecil di negara-negara yang mengalami tekanan berat karena krisis pangan global". Kebijakan World Bank ini dapat dipastikan akan semakin menyulitkan negara-negara miskin dalam mengatasi krisis pangan di masa depan dikarenakan tekanan utang luar negeri.

Dalam pengalaman Indonesia, berbagai kebijakan yang didorong dalam rangka mengatasi

krisis pangan bersandar pada peran perusahaan- perusahaan raksasa dalam menghasilkan pangan. Kebijakan menciptakan ancaman yang sangat besar bagi kehidupan jutaan petani yang terancam kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Penanganan krisis pangan versi lembaga keuangan global dan negara-negara maju dilaksanakan melalui food estate. Kebijakan ini akan secara langsung berimplikasi terhadap perampasan lahan pertanian penduduk oleh perusahaan-persuahaan raksasa.

Kesimpulan: Implikasi pada Kebijakan Nasional

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia telah memberikan fasilitas keuangan, berupa utang dan bantuan teknis dalam jumlah besar yang diarahkan untuk pembentukan komunitas ekonomi ASEAN yang mendukung pelaksanaan agenda liberalisasi investasi, perdagangan, keuangan dan jasa.

Terjadi peningkatan jumlah utang luar negeri yang diterima oleh pemerintah terutama sejak krisis keuangan global tahun 2008. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kerangka dasar penanganan krisis sebagaimana disepakati dalam pertemuan APEC di Lima – Peru dan pertemuan G-20 di Washington

Amerika pada tahun 2008. Yaitu bagaimana melakukan suatu upaya reformasi struktural perekonomian dunia yang berlandaskan pada prinsip pasar. Dengan cara mendorong rezim investasi dan perdagangan bebas, meningkatkan peran lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, ADB, dll) dalam mendorong agenda-agenda pembangunan serta meningkatkan penyaluran bantuan (utang) bagi negara-negara yang terkena krisis.

Pelaksanaan agenda ekonomi pasar bebas jelas bertentangan dengan landasan perekonomian nasional yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Kendati demikian, pemerintah tetap mengabaikan amanat konstitusi dan memilih untuk mengikuti kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut walaupun sangat merugikan Indonesia.

Indonesia telah terbebani utang dalam jumlah yang sangat besar. Hingga Maret 2011, posisi utang pemerintah pusat telah mencapai Rp 1.694,63 triliun. Terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp597 triliun dan Surat Berharga Negara sebesar Rp1,098 triliun. Selama triwulan pertama 2011, jumlah utang bertambah sebesar Rp17,78 triliun dibandingkan posisi Desember 2010. Proporsi utang luar negeri pemerintah masih didominasi oleh tiga kreditor utama yaitu: Jepang, Asian Development Bank (ADB), dan Bank Dunia dengan kontribusi hingga 76% dari total utang luar negeri pemerintah saat ini. Ketiganya juga sangat aktif membiayai sejumlah proyek dan program utang hingga tahun 2011 (Koalisi Anti Utang, 2011).

Besarnya beban utang, menyebabkan beban pemerintah dalam APBN sangat besar. Pada tahun 2010, alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN mencapai Rp237 triliun. Merupakan jumlah terbesar dalam alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2010. Pada tahun 2011, pemerintah merencanakan untuk menambah alokasi pembayaran utang hingga mencapai Rp247 triliun, atau Rp10 triliun lebih besar dari tahun 2010.

Kondisi ini jelas menyebabkan beban fiskal pemerintah semakin berat. Dengan tidak adanya kelonggaran dalam mekanisme pembayaran utang, penggunaan anggaran negara setiap tahun terlebih dahulu diprioritaskan untuk membayar cicilan utang dengan mengorbankan alokas anggaran sosial. Jika terus dibiarkan, maka rakyat banyak akan terus-menerus menjadi korban. Pembayaran utang sesungguhnya merupakan beban berat yang seringkali ditimpakan kepada si

miskin, dengan cara melakukan program “pengetatan” seperti memotong subsidi dan anggaran sosial yang sangat dibutuhkan.

Hal ini bertentangan dengan semangat konstitusi UUD 1945 pasal 23 yang menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat. Di bawah sistem neoliberal, politik anggaran tidak diarahkan untuk mendorong kemajuan perekonomian rakyat yang semakin ditindas di bawah rezim perdagangan bebas, misalnya dengan cara memperbesar kapital dan kepemilikan alat produksi bagi rakyat atau meningkatkan kemakmuran bagi banyak orang untuk menjamin kehidupannya secara bermartabat dengan cara menggratiskan pendidikan dan membangun perumahan-perumahan rakyat.

Bibliografi

Arif Darin, Neo Kolonialisme, jurnal ahkam 13 no.2c nopember, 2011

Harvey David, Imperialisme Baru, Genealogi dan logika kapitalisme kontemporer, terj. Eko, Yogyakarta: Resist book 2010.

Giddens Anthoni, Runaway world: How Globalization is reshaping our lives Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Lomba, Ania, Kolonialisme/pasca kolonialisme, Jogjakarta: Bentang budaya, 2003.

Mua'llifin Darin Arif, Neo Kolonialisme : Analisis sejarah dan Gerakan Neo Kolonialisme Suabaya : Jurnal ashabi Vol. 13, 2012.

Prasetyo AP, Implikasi Praktik Neokolonialisme dalam Globalisasi Terhadap Stress dan Penuaan Dini. Solo: Fakultas Kedokteran UNS. 2009.

Lomba Ania, colonialism/postcolonialism, terj. hartono, Jogja : Bentang budaya, 1998.

James Petras, cultural imperialism in the late 20th century, materi presentasi terjemahan heru endro sayono, 2006.